

POTRET BUMDES KECAMATAN AIR SUGIHAN DAN KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN

Sunardi, Diah Isnaini Asiati, Apriyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
darmayanti@um-palembang.ac.id

Abstract

Improving Bumdes governance will always require identification of problems and solutions so that Bumdes can go to star 5. This activity carried out in 38 villages in Air Kumbang and Muara Sugihan districts, participants of each event by two Bumdes managers, the activities are divided into two days. Different, by collaborating with the sub-district government and Palembang Muhammadiyah University. The result of this activity is Bumdes has many internal problems. Furthermore, the solutions that must be immediately adopted are: fixing and strengthening, business mapping, and business selection evaluated through a business feasibility study, an evaluation of the AD / ART that has prepared, the need for a companion from the government, and universities and strengthening human resources.

Keywords: Business Feasibility Study, HR Management, Assistance Program.

Abstrak

Peningkatan tatakelola bumdes akan selalu membutuhkan inentifikasi masalah dan solusi, sehingga bumdes dapat menuju bintang 5. Kegiatan ini dilakukan di 38 desa yang ada di kecamatan Air Kumbang dan Muara Sugihan, peserta kegiatan masing-masing oleh 2 pengelola Bumdes, kegiatan dibagi dalam 2 hari yang berbeda, dengan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil kegiatan ini adalah bumdes banyak menghadapi masalah internal misalnya: pemahaman terhadap bumdes rendah, pemetaan usaha belum focus dan pemilihan usaha tanpa studi kelayakan usaha, penyusunan AD/ART Bumdes bersifat ikut-ikutan, tata kelola Bumdes masih rendah, pertanggungjawaban dan laporan keuangan belum dilakukan. Selanjutnya solusi yang diharus segera ditempuh adalah: membenahi dan memperkuat, pemetaan usaha dan pemilihan usaha dilakukan evaluasi melalui studi kelayakan usaha, evaluasi terhadap AD/ART yang sudah disusun, perlunya pendamping dari pemerintah dan perguruan tinggi dan penguatan SDM.

Kata kunci: Studi Kelayakan Bisnis, Tata Kelola SDM, Program Pendampingan.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia
tahun 2019 sebanyak 268.369.114

orang (Survey BPS, n.d., 2019) jumlah desa dan kelurahan tahun 2015 sebanyak 83.451 (74.957 desa dan 8.494 kelurahan). Pembangunan desa dan kelurahan memiliki gap yang sangat jauh, hal ini terlihat dari pembangunan kota cenderung maju setelah program PNPM Perkotaan digelontorkan pemerintah pusat dan desa tertinggal pembangunannya walaupun program PNPM Perdesaan juga digelontorkan. Sejak disahkan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mendapatkan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya pemerintah untuk memperlebar perbedaan pembangunan ini, pemerintah pusat menggelontorkan program Dana Desa, yang salah satunya diperuntukkan mendirikan Badan usaha Milik Desa. Hal ini dilakukan dalam rangka merealisasikan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Badan Usaha milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (UU No 6, 2014). Melalui Permendes No 4 Tahun 2015 tujuan Badan usaha Milik Desa untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, pengelolaan potensi desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa. Banyak Bumdes yang mengalami kesuksesan dan banyak juga mengalami

kegagalan, hal ini perlu dikaji lebih mendalam terutama tentang kegagalan Bumdes atau memiliki permasalahan, sehingga terdapat proposionalitas antara kenaikan jumlah dana desa dengan jumlah kualitas Bumdes.

Tatakelola Bumdes dapat berjalan dengan baik apabila tatakelola desa sudah baik (Suryanto, n.d., 2018) untuk mendeteksi dini apakah Bumdes yang dikelola dapat diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu: 1) bintang 1 apabila bumdes sudah berdiri tetapi usaha belum jelas, 2). Bintang 2 apabila usaha bumdes sudah jalan tetapi belum mendapat laba, 3). Bintang 3 apabila bumdes sudah laba tetapi belum besar, 4) bintang 4 apabila laba bumdes sudah mencapai 1 milyar, dan 5) bintang 5 apabila bumdes mendapatkan laba diatas 1 milyar dan memberikan kontribusi masyarakat (Suryanto, n.d., 2018).

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan Bumdes telah dilakukan antara lain: pembentukan panitia harus memerlukan semua tahapan dan melibatkan partisipasi masyarakat serta memperhatikan aspek sosial dan ekonomi (Tibalo, 2019; Setyobhakti, 2017), Pengelolaan Bumdes yang baik akan meningkatkan perekonomian masyarakat, pendapatan asli desa (Tarmizi; Ifka, 2018; Putri Agita, 2017), Bumdes yang berhasil harus disertai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat meningkat (Iskanto, 2018), aspek yang harus dipersiapkan pendirian Bumdes adalah membangun inisiatif pelayanan, demokratisasi dan partisipasi (Dewi, 2014), Bumdes dapat memberi peluang mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat (Nasution, 2018), Bumdes sukses akan memperkuat ketahanan wilayah dan dapat menekan urbanisasi

dan melindungi masyarakat dari rentenir (Setiawan dkk, 2015); (Gunawan, 2011), inovasi Bumdes diperlukan untuk meningkatkan daya saing (Novandi & Adi, 2019; Hermiati & Zulhakim, 2016), Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Bumdes (Mutolib dkk, 2019; Novandi & Adi, 2019), Bumdes perlu membangun rantai wirausaha, pasar wirausaha dan kualitas wirausaha, merek wirausaha (Fatimah, 2018), kegagalan Bumdes disebabkan antara lain rendahnya tingkat pendidikan, Sumber daya manusia, perbedaan kepentingan, kurang partisipasi, permodalan, rencana kerja yang kurang jelas, minimnya pendampingan, rencana kerja yang kurang jelas (Jaka Sulakna, 2019 ; Djaha, 2017; Nugrahaningsih; 2016) serta perlunya penguatan ekonomi desa melalui penyusunan laporan keuangan dan pengukuran kinerja secara kontinyu serta evaluasi secara berkesinambungan. (Nugrahaningsih, 2016).

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan memiliki 21 kecamatan dan 304 desa/kelurahan. (BPS, n.d, 2019). Kegiatan ini dilakukan di kecamatan Air Kumbang dan Kecamatan Muara Sugihan, kedua kecamatan terletak 25 km dari ibukota kabupaten, untuk mengakses kedua lokasi ini dapat ditempuh lewat kendaraan air dan darat. Kecamatan Air Kumbang memiliki 16 Desa dan Kecamatan Muara Sugihan memiliki 22 Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan camat Air Kumbang Desa yang sudah didirikan Bumdes sebanyak 16 unit dan untuk kecamatan Muara Sugihan desa yang memiliki Bumdes sebanyak 21 unit, ini menunjukkan bahwa Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin sudah memiliki Bumdes. Hasil obeservasi awal ditemukan bahwa: bumdes yang sudah berdiri 65% telah memiliki usaha namun belum

mendapat laba dan sebagian besar usahanya simpan pinjam dan usaha dagang kebutuhan pokok, 25% bumdes belum berdiri dan usahanya belum jelas, selanjutnya 10% bumdes sudah mendapat keuntungan tetapi belum besar. Berdasarkan informasi tersebut perlu adanya identifikasi permasalahan yang ada di desa tersebut dan selanjutnya dihasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dirancang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Bumdes di Kecamatan Air Kumbang dan Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin yang berjumlah 38 desa dan Solusi atau langkah-langkah yang akan diambil. Sehubungan dengan itu kegiatan ini dirancang sebagai berikut: a). melakukan pertemuan terhadap pengelola Bumdes tiap kecamatan, setiap desa diikuti oleh 2 orang, b). setiap pengelola Bumdes melakukan penilaian terhadap kondisi bumdes saat ini, c). setiap pengelola Bumdes menjelaskan proses pendirian Bumdes, d). Setiap pengelola Bumdes menjelaskan masalah internal dan eksternal yang dihadapi, dan e). setiap pengelola Bumdes mengajukan bentuk pendampingan yang diperlukan Rancangan kegiatan ini dikoordinasikan kepada masing-masing kecamatan dan disepakati untuk dilakukan pertemuan antara dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang untuk melakukan pertemuan dalam bentuk pendampingan awal.

Materi pendampingan awal ini dilakukan 24 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Palembang, baik program studi manajemen maupun program studi Akuntansi, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: a).

Filosofi Bumdes, Dasar Hukum Pendirian Bumdes, b). Pemetaan potensi desa dan Pemilihan Jenis Usaha, c). Pendirian Bumdes, d) Tata Kelola Bumdes, e). Pertanggungjawaban dan Akuntansi Bumdes, dan f). Penilaian kinerja Bumdes

Bahanyang diperlukan dalam kegiatan ini adalah bahan presentasi tentang undang-undang desa, peraturan menteri desa tentang modul bumdes, selanjutnya alat utama yang diperlukan adalah infocus, kertas kerja pemetaan potensi desa, spidol, dan contoh dokumen pendirian bumdes, serta video yang menggambarkan bumdes yang sukses dan bumdes yang kurang sukses.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 2 kali dalam 2 bulan, dengan pembagian waktu sebagai berikut:

- a. Kecamatan Air Kumbang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan diikuti oleh 32 pengelola bumdes, mulai pukul 09.00 s.d 17.00, bertempat di Balai Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang. Kegiatan dihadiri oleh Camat Air Kumbang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus mengundang Nara Sumber dari Sekolah Bumdes.
- b. Kecamatan Muara Sugihan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 November 2019, diikuti oleh 66 pengelola Bumdes, lokasi kegiatan dibagi menjadi 2 lokasi mengingat jarak tempuh cukup jauh, kegiatan dimulai pukul 09.00 s.d 17.00, bertempat di Rumah warga dan kantor Bumdes, yang dihadiri oleh sekretaris Camat Muara Sugihan dan Bumdes Sumsel.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: a). mengakses dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kecamatan Air Kumbang dan Kecamatan Muara Sugihan, b).

melakukan cross check data dengan pegawai kantor camat yang membidangi, c). melakukan wawancara dengan pengelola Bumdes masing-masing desa, d). melakukan analisis dari kuesioner yang didistribusikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini variable yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Pemetaan Permasalahan Bumdes
Adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pengelola Bumdes, Indicator : a). pemahaman pengelola Bumdes terhadap Bumdes, b). penentuan jenis usaha, c). Penyusunan studi kelayakan usaha, d). pendirian Bumdes, e). Tata kelola Bumdes, f). pertanggungjawaban dan akuntansi Bumdes, dan g). Pengukuran kinerja Bumdes.
- b. Solusi Kegiatan
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan atau mengurangi permasalahan dalam pengelolaan Bumdes, Indicator: a). Perbaikan tata kelola desa, b). evaluasi atas pemilihan jenis usaha, c). mengevaluasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disusun, d). pendampingan dari tenaga ahli atau masyarakat (perguruan tinggi), dan e). penguatan sumber daya manusia dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Permasalahan

Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menentukan langkah selanjutnya, sehingga perlu ditemukan atau dipetakan permasalahan yang ada masing-masing Bumdes. Berikut rekapitulasi jawaban atas kuesioner yang telah dibagikan kepada pengelola Bumdes.

Mengacu pada table 1 di atas, rata-rata jawaban mengarah pada sikap kurang paham dan tidakpahaman, hal ini menunjukkan bahwa pengelola Bumdes kurang memahami dalam mengelola Bumdes yang benar, hal dapat dilihat dari pemahaman arti Bumdes dan dasar hukum Bumdes di atas 40% pengelola Bumdes tidak paham, selanjutnya pemetaan potensi usaha tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak focus, begitu juga penentuan jenis usaha lebih banyak memahami, namun tidak dilakukan studi kelayakan

usaha, sehingga tidak dapat diketahui apakah jenis usaha yang dilakukan itu menghasilkan atau tidak atau sesuai dengan peraturan tidak. Pendirian Bumdes dilakukan dengan musyawarah yang baik, walaupun terdapat beberapa masyarakat yang tidak dilibatkan, hal ini dapat dilihat dari persentase masyarakat yang menjawab kurang paham tentang penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes sebesar 58,70%, karena hanya mengikuti contoh yang sudah ada.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden atas Kondisi bumdes

No	Pernyataan	% Jawaban		
		P	KP	TP
1	Pemahaman tentang Bumdes	57.14	33.67	9.18
2	Pemahaman dasar hukum bumdes	55.10	36.73	8.16
3	Pemetaan potensi usaha	48.98	40.82	10.20
4	Penentuan jenis usaha	76.53	21.43	2.04
5	Penyusunan studi kelayakan usaha	12.24	76.53	11.22
6	Pendirian Bumdes	76.53	12.24	11.22
7	Penyusunan AD/ART Bumdes	30.43	58.70	10.87
8	Tata kelola Bumdes	23.47	28.57	47.96
9	Pertanggungjawaban Bumdes	21.43	34.69	43.88
10	Laporan keuangan Bumdes	12.24	23.47	64.29
11	Pengukuran kinerja Bumdes	9.18	15.31	75.51
	Rata-Rata	38.48	34.74	26.78

Sumber : hasil Pengolahan data, 2019,

Sebagian besar pengurus Bumdes tidak mengetahui Tata Kelola Bumdes yang baik, sehingga dalam menjalankan Bumdes tidak focus dan sebagai pekerjaan sambilan. Pemahaman Pengelola Bumdes terhadap Pertanggungjawaban juga sebagian besar tidak paham, sehingga muncul kesan Bumdes dikelola sendiri dan dipertanggungjawabkan sendiri. Lain lagi pemahaman tentang laporan keuangan Bumdes hamper 65% pengelola tidak memahami hal ini, karena latar belakang pengelola berasal

dari lulusan SMA atau sederajat dan sarjana pendidikan, terakhir pemahaman pengelola Bumdes terhadap pengukuran kinerja tidak diperlukan karena Bumdes baru berdiri.



Gambar 1. Pelatihan Pengelola BUMDes



Gambar 3. Pendampingan Pengelola BUMDes



Gambar 2. Pendampingan Pemetaan Desa Serta Pemetaan BUMDes

Solusi Pemecahan masalah

Berikut ini harapan yang diinginkan oleh pengelola Bumdes, sehubungan dengan permasalahan di atas untuk memperbaiki pengelolaan Bumdes secara keseluruhan.

Tabel 2. Harapan Pengelola Bumdes

No	Harapan	%jawaban		
		S	KS	TS
1	Tata kelola perlu diperbaiki	75.51	15.31	9.18
2	Perlu evaluasi pemetaan usaha	83.67	14.29	2.04
3	Perlu evaluasi pemilihan jenis usaha	79.59	7.14	13.27
4	Perlu evaluasi AD/ART yang sudah ada	45.51	47.14	7.35
5	Kurangnya Tenaga Ahli pendamping	87.76	7.14	5.10
6	Perlu Pendamping dari Perguruan tinggi	89.80	6.12	4.08
7	Perlu mahasiswa KKN dari PT	90.82	8.16	1.02
8	SDM Pengelola BUMDES perlu dikuatkan	91.84	6.12	2.04
9	SDM Pengelola BUMDES perlu pelatihan	95.92	3.06	1.02
	Rata-Rata	80.05	13.83	6.12

Sumber : hasil pengolahan data , 2019

Tabel 2 di atas menunjukkan harapan atau solusi pengelola Bumdes terhadap permasalahan di atas, perlu segera diselesaikan. Rata-rata jawaban menginginkan adanya perbaikan atau evaluasi atas tata kelola Bumdes yang harus dilakukan secara profesional, pemetaan usaha juga perlu dievaluasi dengan melibatkan beberapa orang yang memahami bisnis, begitu juga pemilihan jenis usaha harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada di Desa tersebut, selanjutnya anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga harus benar benar hasil kesepakatan Musdes tidak mengikuti contoh yang ada. Pengelola Bumdes juga mengharapkan tenaga ahli perlu ditambah, selain itu juga peran dosen perguruan tinggi juga dapat mendampingi pengelola Bumdes, peran perguruan tinggi juga dapat dikolaborasi pada saat mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa.

Harapan terakhir adalah sumber daya manusia yang mengelola Bumdes perlu dikuatkan, maksudnya direkrut orang-orang yang serius dan memiliki latar belakang Bisnis, selain itu juga perlu adanya pelatihan-pelatihan.

SIMPULAN

Pembahasan dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa pengelola Bumdes menghadapi masalah sebagai berikut: a).pemahaman terhadap arti dan dasar hukum masih rendah, b).pemetaan usaha dan pemilihan usaha tanpa studi kelayakan usaha, c). penyusunan AD/ART Bumdes saat Pendirian, hanya mengikuti contoh yang sudah ada, d). Tata kelola Bumdes masih Rendah, e). pertanggungjawaban dan laporan keuangan belum dilakukan, f). pengukuran kinerja belum dilakukan. Selanjutnya solusi yang diharus segera dilakukan adalah: a). tata kelola

Bumdes harus segera dibenahi agar kuat, b). pemetaan usaha dan pemilihan usaha dilakukan evaluasi melalui studi kelayakan usaha, c) Evaluasi terhadap AD/ART yang sudah disusun, d) perlunya pendamping dari pemerintah dan perguruan tinggi d). Penguatan SDM

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Muhammadiyah (LPPM) Universitas Muhammadiyah Palembang, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Semua Kepala Desa dan Pengelola BUMDes Kecamatan Air Kumbang dan Kecamatan Muara Sugihan.

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 6 Tahun 2014. BPS. (n.d.). Statistik Daerah Kabupaten Banyuasin 2019.
- Dedi;Risman;Abuzar. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Badan Usaha Milik Desa (bumdes) 1. *Eko Dan Bisnis*, 9(3).
- Fatimah, R. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Studi Pemuda*, 7(2), 122–132.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen Bumdes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisas. *Saint*, 10(3), 61–72.

- Jaka Sulakna, I. N. (2019). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) kasus di bumdes mitra sejahtera desa cibunut kecamatan argapura kabupaten majalengka. *Ekonomi Pertanian Dan Agrabisni (JEPA)*, 3, 348–359.
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., Effendi, I., & Viantimala, B. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura , Kabupaten Pesawaran , Provinsi Lampung. *JSHP*, 3(1), 10–19.
- Nasution, M. yunan. (2018). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Implikasinya Bagi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Sungkai*, 6(2), 71–87.
- Putri. (n.d.). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan).
- Rudi Suyatno. (n.d.). TOT BUMDes.
- Setiawan, D., Jostenz, T. G., Novalino, R. D. A., Studi, P., Pertahanan, E., & Pertahanan, U. (2018). Potential Tourism to Realize Regional Economic Resilience (study. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(3), 1–24.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *V*(1), 1–14.
- Tarmizi;Ifka. (2018). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa, *18*, 129–142.